

KASUS SABU DITUKAR TAWAS

Jaksa Ungkap Kode "Singgalang 1" dari Irjen Teddy Minahasa ke AKBP Dody

JAKARTA (IM) - Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap kode Singgalang 1, dalam percakapan Irjen Teddy Minahasa dengan anak buahnya, AKBP Dody Prawiranegara.

Percakapan itu dilakukan di Hotel Santika Bukittinggi, Sumatera Barat pada 20 Mei 2022 lalu. Kala itu, keduanya bertukar pesan sebelum konferensi pers terkait pengungkapan 41,4 kilogram sabu.

"Disebutkan anggota kepolisian, bahwa "Singgalang 1" merupakan sebutan atau panggilan untuk Kapolda Sumatera Barat (Teddy Minahasa)," ungkap JPU Setyo Adhi Wicaksono di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (8/2).

"Singgalang" adalah nama gunung yang berada di wilayah Sumatera Barat.

Mengutip surat dakwaan JPU, ketika acara makan malam konferensi pers berlangsung, Teddy mengirimkan pesan kepada Dody.

"Terdakwa mengatakan 'jangan lupa "Singgalang 1" kepada saksi Dody Prawiranegara, yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam," demikian surat dakwaan Teddy Minahasa.

Sayangnya Jaksa tidak menjelaskan lebih lanjut makna kode tersebut. Namun dalam surat dakwaan AKBP Dody Prawiranegara, disebut menerima perintah untuk menukar sabu dengan tawas usai makan malam itu.

Sebelumnya, JPU mendakwa AKBP Dody Prawiranegara menukar barang bukti narkoba jenis sabu sitaan Polres Bukittinggi dengan tawas. Hal itu bermula ketika Dody meminta arahan kepada atasannya, yakni Teddy Minahasa, terkait pelaksanaan konferensi pers kasus narkoba yang berhasil diungkap.

"Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkoba dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu seberat 41,387 kilogram," ujar JPU saat membacakan dakwaan Dody, Rabu (1/2) lalu.

Dody diduga menukar 5 kilogram barang bukti sabu dengan 5 kilogram tawas.

Sebagai informasi, kasus peredaran narkoba yang diduga dikendalikan Irjen Teddy Minahasa terungkap dari penyelidikan Polda Metro Jaya. Awalnya Polda Metro Jaya menangkap tiga warga sipil. Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan, diketahui keterlibatan tiga oknum polisi. Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy Minahasa.

Kadiv Propam Irjen Syahardianto pun diminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjemput Teddy untuk diperiksa. Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Arif Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Koptol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pudjiastuti, Syamsul Ma'arif, dan AKBP Dody Prawiranegara. Teddy dan para tersangka kemudian ditahan di rumah tahanan Narkoba Polda Metro Jaya.

Para tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2 subditer Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ● **lus**

FOTO: ANTARA



PELEPASAN PERSONEL POLRI UNTUK GEMPA TURKI

Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto (kiri) meninjau pasukan saat memimpin apel pelepasan personel Polri untuk gempa Turki di Jakarta, Kamis (9/2). Polri mengirim 26 personel yang terdiri dari tim medis, Disaster Victim Identification (DVI), dan dua anjing pelacak K-9.

Jelang Pemilu 2024, Polri Ingatkan Jajarannya Jaga Netralitas Saat Gunakan Media Sosial

Polri akan lakukan pengawasan intensif di media sosial menjelang Pemilu 2024. Langkah ini diambil karena medsos menjadi medium yang sangat aktif.

JAKARTA (IM) - Kepala Humas Polri, Irjen Dedi Psetyo, mengingatkan seluruh personel Polri untuk menjaga netralitas dalam menggunakan media sosial media menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Apabila ada yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi kode etik, atau bahkan jika melakukan tindak pidana akan disanksi sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/2).

Dedi mengatakan bahwa jejak digital sangat mudah dimodifikasi. Maka dari itu,

ia mengingatkan agar seluruh anggota Polri menjunjung tinggi etika di ruang publik, termasuk saat menggunakan media sosial.

Polri akan melakukan pengawasan intensif di media sosial menjelang Pemilu 2024. Langkah ini diambil karena media sosial menjadi medium yang sangat aktif seperti yang terjadi pada Pemilu 2019,

"Polri juga meminta seluruh pihak untuk membantu menjaga situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) agar tetap kondusif," ujarnya.

Dedi sebelumnya me-

mastikan bahwa setiap anggota Polri menjaga netralitas memasuki tahun politik jelang Pemilu Serentak 2024. Netralitas Polri sudah diatur dalam UUD 1945 dan TAP MPR.

"Jelas kalau bicara regulasi dulu sumber sudah sangat jelas, TAP MPR No 7 Tahun 2000 (Pasal 10) sudah jelas, Polri harus netral, Polri tidak boleh ikut politik praktis, itu penting," kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, dikutip Kamis (19/1).

Selain TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000, netralitas Polri juga diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Aturan ini menyebutkan Polri harus netral dan tidak terlibat dalam politik praktis serta tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Perpol baru Nomor 7 Ta-

hun 2022 tentang Kode Etik Polri juga mengatur hal yang sama. Polri harus bersikap netral pada pemilu.

Guna memastikan netralitas, Divisi Humas Polri telah mengeluarkan penerangan satuan (pensat). Pensat ini berisi panduan netralitas kepolisian pada tahun politik 2024.

"Karopenmas sudah membuat lebaran Pensat, sama secara rinci sudah dijelaskan, sesuai TAP MPR, sesuai Perpol, menyebutkan Polri harus netral, Polri tidak terlibat politik identitas, dan Polri tidak menggunakan haknya

baik untuk dipilih dan memilih," jelasnya.

Pengawasan netralitas internal telah dilakukan oleh segala fungsi mulai dari tingkat Mabes Polri dilakukan Divpropam, dan Irwasum. Kemudian tingkat daerah akan diawasi Irwasda sampai ke tingkat Polres.

"Kalau misalnya terbukti bersalah ya pasti sanksi kode etik sudah pasti jelas bisa di sanksi kepada siapapun yang terbukti terlibat tidak netral di dalam pemilu. Baik Pilkada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional," ujarnya. ● **lus**

Hari Ini Pelapor 9 Hakim MK akan Beri Keterangan Tambahan di Polda Metro Jaya

JAKARTA (IM) - Pengugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, Zico Leonard Diagardo Simanjuntak, dijadwalkan memberi keterangan tambahan melalui pengacaranya ke Polda Metro Jaya terkait diubahnya substansi putusan MK nomor 103/PUU-XX/2022.

"Besok kuasa saya dipanggil jam 13.00 untuk memberikan keterangan tambahan dan sudah dikirimkan suratnya," kata Zico kepada wartawan selepas diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Kamis (9/2).

Zico merupakan pengugat dalam perkara itu dan ia pula yang pertama kali menemukan perubahan substansi putusan perkara yang menyangkut pencopotan eks hakim konstitusi Aswanto tersebut.

Sebelumnya, buntut peristiwa ini, Zico melaporkan 9 hakim konstitusi dan 2 orang panitera MK yang bertugas pada perkara nomor 103/PUU-XX/2022 itu. Laporan ini sudah diregister dengan nomor laporan polisi LP/B/5557/II/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Zico meyakini polisi bakal mengungkap kasus ini secara terang benderang karena sudah menjadi atensi publik. Ia menyoroti perubahan substansi putusan MK ini tidak ditangani dalam koridor pidana umum oleh kepolisian.

"Biasanya kan ada di subdirektorat tindak pidana umum, tapi ini subdirektorat keamanan negara," kata dia.

"Bukannya ini salah, tapi berarti kasus ini menyangkut keamanan negara," tambah Zico.

Sebagai informasi, substansi yang berubah dalam putusan menyangkut pencopotan Aswanto ini hanya melibatkan 2 kata, namun dinilai memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda.

Perubahan itu yakni dari kata "dengan demikian..." menjadi "ke depan..." Secara utuh, menurut Zico, yang dibacakan Saldi Isra selengkapnya adalah, "Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya

hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK..."

Sementara itu, dalam salinan putusan dan risalah persidangan tertulis: "Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus

selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK..."

Perubahan substansi putusan ini dinilai bakal berimplikasi terhadap proses penggantian hakim konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah yang dilakukan sepihak oleh DPR. Perubahan ini juga diprediksi menciptakan kerancuan.

Sebab, jika sesuai yang disampaikan Saldi di sidang, pergantian hakim konstitusi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK sehingga penggantian Aswanto tidak boleh dilakukan.

Untuk diketahui, MK membentuk MKMK pada 30 Januari 2023 guna mengusut dugaan perubahan putusan nomor 103/PUU-XX/2022 yang menguji materiil UU MK.

MKMK terdiri dari 3 orang anggota. Eks hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna mewakili unsur tokoh masyarakat, hakim konstitusi Eny Nurbaningsih mewakili unsur hakim konstitusi aktif, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sudjito mewakili unsur akademisi. ● **lus**



FOTO: ANTARA

PERSIAPAN TIM BASARNAS KE TURKI

Sejumlah anggota Basarnas menyusun peralatan dalam rangka persiapan pengiriman bantuan tim pencarian dan penyelamatan (SAR) ke Turki di gudang keberangkatan, Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (9/2). Pemerintah melalui Basarnas akan mengirimkan tim INASAR (Indonesian Search and Rescue) yang terdiri dari 47 personel untuk membantu proses pencarian korban gempa di Turki.

Melawan saat Ditangkap, Dua Anggota Gang Motor Ditembak Polisi di Cimahi

CIMAHI (IM) - Dua anggota gang motor yang membacok warga di Kota Cimahi, terpaksa dilumpuhkan. Kakinya terpaksa ditembak polisi karena melawan dan ber upaya kabur saat akan ditangkap.

Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono mengatakan, pembacokan terhadap salah seorang warga yang masih berstatus mahasiswa, terjadi pada Senin (23/1) lalu sekitar pukul 02.00 WIB. Lokasinya di Jalan Pesantren, Kelurahan Cimahi Utara, Kota Cimahi.

"Dua tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial GS (23) dan AB (22). Mereka sempat melakukan perlawanan terhadap anggota polisi, sehingga kami beri tindakan terukur," ujar AKBP Aldi Subartono, Kamis (9/2).

Korban pembacokan adalah AR (19) yang mengalami luka bacok di bagian kepala dan badan, sementara seorang rekannya berhasil menyelamatkan diri. Salah seorang pelaku yang berinisial AFA hingga kini masih buron dan dalam pengejaran petugas.

Aldi mengungkapkan, setelah menerima laporan pihaknya melakukan penyelidikan kasus tersebut. Hasilnya pada 3 Febru-

ari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, tersangka GS ditangkap di daerah Cibabat. Sedangkan tersangka AB ditangkap sehari setelahnya sekitar pukul 23.00 WIB.

Aksi brutal anggota gang motor tersebut berawal saat mereka menenggak minuman beralkohol. Mereka tersinggung, saat mendengar suara cacian yang dilontarkan beberapa anggota gang motor lain yang melewati mereka.

Kemudian mereka mencari anggota gang motor tersebut dengan berkeliling secara random. Naas seorang mahasiswa berinisial AR (19) yang bukan anggota gang motor menjadi korban pembacokan karena berpapasan dengan para pelaku.

Meski korban telah mengaku bukan anggota gang motor, ketiga tersangka tetap menyerang korban. Akibatnya korban mengalami luka bacok di kepala dan punggung. Mereka melakukan pengeroyokan dengan menggunakan celurit dan juga pecahan genteng.

"Para pelaku kita kenakan Pasal 170 ayat 2 KUHPidana, dengan ancaman penjara 9 tahun penjara," katanya. ● **lus**

Momen Hadiri Hari Pers, Kapolri, Panglima dan Para Kepala Staf TNI Naik Kereta Cepat

MEDAN (IM) - Presiden Joko (Widodo) (Jokowi), jajaran menteri, Panglima TNI dan Kapolri, hingga sejumlah tokoh lainnya, menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Rombongan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, beserta seluruh Kepala Staf TNI, tiba di Sumut pada, Rabu (8/2) malam.

Setibanya di Bandara Kualanamu, Kapolri, Panglima dan Kepala Staf TNI memilih menggunakan sarana transportasi publik yakni kereta cepat untuk menuju Kota Medan.

"Pak Kapolri, Panglima TNI beserta Kepala Staf menggunakan kereta cepat dalam melakukan perjalanan dari Kualanamu ke Kota Medan untuk menghadiri

peringatan Hari Pers Nasional," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (9/2).

Menurut Dedi, rombongan tersebut memilih menggunakan kereta cepat lantaran menghormati masyarakat setempat dan tidak ingin mengganggu mobilitas pengguna jalan di wilayah sekitar.

Mengingat, kata Dedi, apabila Panglima, Kapolri dan seluruh Kepala Staf menggunakan mobil akan terjadi rangkaian iring-iringan panjang yang dikhawatirkan mengganggu pengguna jalan. Sehingga, mereka memutuskan untuk naik kereta cepat demi tetap menjaga kondisitas warga.

"Kenapa memilih transportasi massal? Karena rombongan cukup banyak, dan kalau pakai rangkaian kendaraan akan panjang. Beliau-beliau tidak mau pengguna jalan lainnya ter-

ganggu," ujar Dedi.

Dedi menambahkan, Kapolri, Panglima dan Kepala Staf juga menyempatkan untuk menyapa langsung masyarakat di stasiun kereta cepat tersebut.

"Suasananya di stasiun ya masyarakat antusias ya. Banyak juga yang motret Pak Panglima TNI dan Kapolri, serta rombongan pakai HP, yang menyapa. Pak Panglima TNI dan Kapolri juga menyapa masyarakat," ucap Dedi.

Dalam menghadiri Hari Pers Nasional di Sumut, rombongan tersebut dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim) ke Bandara Kualanamu, dengan menggunakan Pesawat TNI AU.

Rombongan langsung terbang dari Jakarta, usai menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, pada, 8 Februari 2023. ● **lus**

FOTO: ANTARA



DAMPAK GEMPA BUMI JAYAPURA

Sejumlah polisi mencari korban di reruntuhan bangunan rumah makan yang tenggelam akibat gempa bumi di Jayapura, Papua, Kamis (9/2). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan empat warga meninggal dunia dan sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 5,4 SR tersebut.